

ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Fika Widya Apriyanti¹⁾, Shita Tiara²⁾, Ratna Sari Dewi³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: fikawidya@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Belanja Daerah BPKA Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran BPKA Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Belanja Daerah BPKA Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015-2017 dapat diukur dengan analisis varians belanja, pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.

Kata Kunci: Analisis Kinerja, Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran

ABSTRACT

The objective of the research was to find out the regional government budget performance on Financial and Asset Management Agency in Serdang Bedagai Regency in period 2015-2017. This research was a qualitative descriptive research which are only collected, complied, clarified and interpreted the data so that it can find a clear view of the problem researched. The technique of collecting the data used in this research was documentation technique. The data used was secondary data of budget realization report on Financial and Asset Management Agency in Serdang Bedagai Regency in period 2015-2017. The result of the research showed that regional government budget performance Financial and Asset Management Agency in Serdang Bedagai Regency in the 2015-2017 period could be measured by budget varians analysis, budget growth, budget compatibility analysis and budget efficiency ratio.

Keyword : Performance analysis, Budget, Budget realization report

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan dalam mengatur kepentingan Bangsa dan Negara. Lembaga Pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas layanan kepada seluruh masyarakat dan sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan bukan untuk mencari laba tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan di masa yang akan datang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli Daerah dengan ditambah dan diperbaikinya infrastruktur oleh Pemerintah Daerah untuk memajukan pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk pembangunan di daerah tersebut. Peran Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi

disuatu daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Salah satunya pengukuran kinerja belanja menggunakan belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk sehari-hari Pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Serta belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan contohnya belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Hal ini dilakukan bukan sekedar untuk menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengukuran kinerja belanja diukur dengan menggunakan alat analisis varians, analisis pertumbuhan, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal dan berfungsi untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang digunakan oleh instansi.

Belanja Daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan

merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya, karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya ketidak efisien dan kebocoran. Maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah belanja dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja mutlak harus dilakukan untuk dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. Rasio efektivitas dan efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah, angka efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standart baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa belanja Pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari seratus persen (100%), sebaliknya jika melebihi seratus persen (100%) maka mengidentifikasi terjadi pemborosan anggaran.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan

keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan menghasilkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan ini diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai. Adapaun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintahan melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah tentang SAP berbasis akrual ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak diluar eksekutif.

Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintahan mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang No. 1 Tentang Perbendaharaan menegaskan atas pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu kabupaten yang dibentuk sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2006 telah ditetapkan bahwa tanggal 7 Januari 2004 sebagai hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan Sei Rampah sebagai Ibukota Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai amanat Undang-Undang otonomi Daerah berkewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dengan menjalankan seluruh urusan Pemerintah selain urusan politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional serta agama yang merupakan urusan dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan pelaksanaan wewenang sebagai wujud prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai kewajiban yang

menjadi tugas pokoknya dalam rangka pelaksanaan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Lakip Daerah Sergai Tahun 2013).

Tabel 1.1.

**Laporan Akuntabilitas Kerja
Instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai**

| Tahun | Hasil Laporan Audit BPK |
|-------|-------------------------|
| 2014 | WTP |
| 2015 | WDP |
| 2016 | WDP |
| 2017 | WDP |

Sumber: BPKA Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan tabel diatas, Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015-2017 menjelaskan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan pada tahun 2014 hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disebabkan antara lain inventarisasi asset yang belum baik dan penatausahaan keuangan yang masih perlu diperbaiki. Dimana salah satu akun yang disoroti karena mengalami ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja belanja Laporan Realisasi

Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari analisis varians.

2. Untuk mengetahui kinerja belanja Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari analisis pertumbuhan belanja.
3. Untuk mengetahui kinerja belanja Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari analisis keserasian belanja.

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah



2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Data yang digunakan peneliti adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2015-2017. Subjek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Serdang Bedagai. Objek

penelitian adalah kinerja belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2017. Adapun untuk mengetahui analisis kinerja anggaran belanja daerah tersebut dapat dihitung dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut :

1. Analisis Varians Belanja
2. Analisis Pertumbuhan Belanja
3. Analisis Keserasian Belanja
4. Rasio Efisiensi Belanja

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2015-2017

| Tahun | Anggaran Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Varians Belanja (Rp) | (%) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 2015 | 24.729.222.972,84 | 21.666.657.417,00 | 3.063.565.555,84 | 87,62 |
| 2016 | 28.259.135.836,31 | 26.031.399.809,00 | 2.227.736.027,31 | 92,12 |
| 2017 | 12.685.431.081,91 | 11.560.561.004,00 | 1.124.870.077,91 | 91,13 |
| Total | 65.673.789.891,06 | 59.258.618.230,00 | 6.415.171.661,06 | 90,23 |

Berdasarkan perhitungan Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam LRA dapat diukur dengan analisis varians belanja. Berdasarkan teori pendukung yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:154) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan. Sebaliknya, pemerintah daerah dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Belanja yang tidak baik apabila realisasi belanja melebihi dari yang ditargetkan.

Dalam penelitian ini, kinerja belanja BPKA Kabupaten Serdang

Bedagai yang diukur dengan analisis varians belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai baik dengan angka rata-rata 93,84%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam penghematan penggunaan realisasi anggaran karena tidak melebihi batas maksimum anggaran. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sartika (2018) dan Liansdo (2016) menggunakan analisis varians belanja yang rata-rata sebesar 90,16% dan 79,09% yang artinya hasil selisih tersebut menunjukkan adanya efisiensi yang tidak melebihi penggunaan anggaran selama tahun anggaran tersebut.

Tabel 2. Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2015-2017

| Tahun | Realisasi Tahun Anggaran Sebelumnya(Rp) | Realisasi Tahun Anggaran Berjalan(Rp) | Pertumbuhan (Rp) | Persentase Pertumbuhan (%) |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2015 | 22.787.609.593 | 21.666.657.417 | (1.120.952.176) | -4,92 |
| 2016 | 21.666.657.417 | 26.031.399.809 | 4.364.742.392 | 20,14 |
| 2017 | 26.031.399.809 | 11.560.561.004 | (14.470.838.805) | -55,59 |
| Total | 70.485.666.819 | 59.258.618.230 | (11.227.048.589) | -15,93 |

Berdasarkan perhitungan tabel 4.2. menunjukkan bahwa kinerja

belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam LRA dapat diukur

dengan analisis pertumbuhan belanja. Berdasarkan teori pendukung yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:156) yaitu Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Dalam penelitian ini, kinerja belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan analisis pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan negatif sebesar -15,93

yang artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya dikarenakan tingginya nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal. Sehingga diharapkan kedepannya BPKA Kabupaten Serdang Bedagai lebih meningkatkan belanja modalnya dibandingkan dengan belanja operasi agar pertumbuhan belanja BPKA kabupaten Serdang Bedagai mengalami pertumbuhan yang positif. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Liansdo (2016) menggunakan analisis pertumbuhan belanja yang mengalami penurunan anggaran sebesar -8,04% yang artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Sedangkan pertumbuhan yang baik dan dikatakan mampu adalah pertumbuhan belanja yang positif seperti penelitian assidiqi (2014) sebesar 11%.

Tabel 3. Analisis Trend Kecerassian Belanja Tahun Anggaran 2015-2017

| Tahun | Belanja Operasi | Belanja Modal | Total Belanja Daerah | Persentase Rasio % | |
|------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 2015 | 20.334.675.4180 | 1.331.981.999 | 21.666.657.417 | 93,85 | 6,15 |
| 2016 | 23.165.401.343 | 2.865.998.466 | 26.031.399.809 | 88,99 | 11 |
| 2017 | 11.378.142.534 | 182.418.470 | 11.560.561.004 | 98,42 | 1,58 |
| Total Rata-Rata | | | | 93,75 | 6,24 |

Berdasarkan perhitungan tabel 3. menunjukkan bahwa kinerja belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam LRA dapat diukur dengan analisis keserasian belanja. Berdasarkan teori pendukung yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:157) Analisis Keserasian Belanja Daerah umumnya menunjukkan bahwa proporsi Belanja Operasi mendominasi Total

Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen dan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah adalah antara 5-20 persen.

Dalam penelitian ini, dari tabel perhitungan 3 terlihat bahwa selama tahun 2015-2017 sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi yaitu 93,75% dibandingkan belanja modal 6,24%

sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan tidak mencapai batas minimum proporsi yang ditetapkan yaitu antara 5-20% anggaran yang dibelanjakan pada periode tersebut. Sehingga anggaran BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar persentasenya pada belanja operasi sedangkan untuk pelayanan publik

seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah. Hal ini terjadi karena penggunaan anggaran pada perencanaan program prioritas lebih mengoptimalkan ke dalam anggaran belanja operasi. penelitian ini sejalan dengan penelitian Assidiqi (2014) dan Sartika (2018) menggunakan analisis keserasian belanja yang menyatakan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, yang artinya belanja operasi lebih mendominasi total belanja daripada belanja modal.

Tabel 4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2015-2017

| Tahun | Anggaran Belanja | Realisasi Belanja | Rasio Efisiensi belanja (%) |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2015 | 24.729.222.972,84 | 21.666.657.417,00 | 87,62 |
| 2016 | 28.259.135.836,31 | 26.031.399.809,00 | 92,12 |
| 2017 | 12.685.431.081,91 | 11.560.561.004,00 | 91,13 |

Berdasarkan perhitungan tabel 4 menunjukkan bahwa kinerja belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam LRA dapat diukur dengan rasio efisiensi belanja. Berdasarkan teori pendukung yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:157) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja anggaran dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah. Jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran dan semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah.

Dari hasil perhitungan tabel 4. dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2017 kemampuan BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan penghematan anggaran belanja mencapai 90,29% atau dalam kategori cukup efisien. Artinya penggunaan dana masyarakat tersebut belum menghasilkan output yang maksimal, serta belum efektif dalam penggunaan anggaran belanja karena anggaran belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai lebih besar untuk belanja operasi yang manfaatnya habis dikonsumsi dibandingkan dengan belanja modal untuk pelayanan publik seperti infrastruktur, irigasi, dan aset lainnya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Assidiqi (2014), Sartika (2018), dan Palilingan (2015) menggunakan rasio efisiensi belanja

daerah yang menunjukkan rata-rata dibawah 100%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja belanja dalam LRA dapat diukur dengan analisis varians belanja. Hal ini terlihat dari realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja dengan angka rata-rata persentase mencapai 93,84% yang menunjukkan hasil bahwa kinerja belanja dinilai baik dan menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan penyerapan realisasi anggaran. Akan tetapi aktifitas penggunaan penyerapan anggaran masih belum terserap sepenuhnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai khusus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai akan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja.
2. Kinerja belanja dalam LRA dapat diukur dengan analisis pertumbuhan belanja. Berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2015-2017 terus mengalami perubahan. Secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai mengalami pertumbuhan negatif. Yang artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang negatif yaitu -15,93%.
3. Kinerja belanja dalam LRA dapat diukur dengan analisis keserasian belanja yang terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja modal terhadap total belanja. Secara umum keserasian belanja BPKA Kabupaten Serdang Bedagai sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Selama tahun 2015-2017 rata-rata belanja operasi sebesar 93,75% sedangkan untuk Belanja Modal sebesar 6,24%. Secara umum dapat lihat bahwa dana belanja daerah lebih dioptimalkan untuk belanja operasi. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang kurang baik karena dana belanja operasi melebihi proporsi belanja yang ditetapkan.
4. Kinerja belanja dalam LRA dapat diukur dengan rasio efisiensi belanja. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2017 kemampuan BPKA Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan penghematan anggaran belanja cukup efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 90,29% yang tidak melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan efisiensi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

Alfira, Samsidar. Skripsi. *Analisis Kinerja Belanja Dalam*

- Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018.
- Bahrin, Assidiqi. Skripsi. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.* Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Faqihuddin, M. (2014). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Layanan Publik.* E-Journal.
- Grance, L.Y. (2016). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.* Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 1473-1484.
- Halim, Abdul. (2011). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. (2013). *Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep & Aplikasi.* Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi 2.* UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, (2016). *Akuntansi Sektor Publik; Edisi Revisi.* UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmono. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Natalia Pardosi, Skripsi: *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011-2016.* Medan: Universitas Sumatera Utara. 2017.
- Nurmala Sari, Eka. (2015). *Akuntansi Sektor; Publik Suatu Pengantar.* Perdana Mulya Sarana, Medan.
- Palilingan, A. 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 17-25.
- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.(2013). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.*
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta.
- ~~Undang-Undang~~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- ~~Undang-Undang~~ Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
- ~~Undang-Undang~~ Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah.

- Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba. Edisi 3*. Mitra Medika Wacana Media, Jakarta.
- Sartika, Dewi. Skripsi. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabet, Bandung.